

# **IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN KURIKULUM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LUWU TIMUR KECAMATAN MALILI**

**1. Haerul Anwar, 2. Ansar, 3. Anshari**

Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Email: dg.sitoedju@gmail.com

**Abstract:** This study aims to determine the description of the implementation of school-based management on the application of autonomy and independence, aspects of parental participation and school partnerships, aspect of transparency and accountability as well as supporting and inhibiting factors in curriculum management at SMK Negeri 1 Luwu Timur. The method used in this research is qualitative research. The technique of collecting data, through interviews, observation and documentation with informants, namely: the vice principal of the curriculum field as the core informant, the principal, the deputy principal in the field of industrial relations, and the school committee as supporting informants. The data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The result of this study indicates that: (1) an overview of the aspects of autonomy and independence which includes: a) authority in curriculum development and teaching programs, b) parties involved in curriculum development and their respective roles, c) supporting and inhibiting factors for implementing autonomy aspects and school independence; (2) a description of the aspects of parental participation and school partnerships which include: a) forms of parental participation and school partnerships in the implementation of the school curriculum, b) forms of school coordination, parents and school partners, c) criteria for selecting school partners, d) strategies in establishing school partnerships, e) supporting and inhibiting factors for parents' participation and school partnerships; (3) a description of the implementation of school transparency and accountability which includes: a) school information system, b) mechanisms for implementing transparency and accountability in school curriculum management. The implementation of the aspects of autonomy and independence in the management of the school curriculum has been carried out well, but still very much needs to be improved, especially in the implementation of activities that can increase student competence, both knowledge and skills of students to face competition in the world of work, to create independent schools, school funding is only limited in the government assistance fund in the form of BOS funds. The implementation of parental participation and school partnerships in managing curriculum and teaching programs is already good. Then the implementation of the transparency and accountability aspects of schools has also been good. There are also no information boards found in schools related to the management of education funds.

Keywords: SBM.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi manajemen berbasis sekolah pada penerapan aspek otonomi, kemandirian, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan faktor-faktor yang pendukung dan penghambatnya dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan yang menjadi informan adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Plt. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, ketua komite sekolah, dan salah satu mitra sekolah. Data dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif

kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aspek otonomi dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur terdiri dari beberapa dimensi yakni: (a) penerapan aspek Otonomi telah dijalankan dengan indikator sekolah membentuk tim pengembang kurikulum dengan melibatkan unsur komite sekolah dan unsur mitra sekolah dengan menjalankan peran masing-masing, sekolah menjalankan kewenangannya dalam penyusunan kurikulum dan program pengajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku. (b) Penerapan aspek kemandirian telah dijalankan dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan sumberdayanya baik dari segi tenaga pendidik dan pendidikannya serta sarana dan prasarannya. (c) Penerapan aspek partisipasi juga telah dijalankan dengan kehadiran komite sekolah yang dikukuhkan melalui surat keputusan kepala sekolah dan dijalankan dengan cukup baik. (d) Penerapan aspek kemitraan terlaksana dengan menggandeng dunia usaha/industri untuk terlibat dalam pengembangan pendidikan di sekolah seperti pada pelaksanaan praktek kerja industri. (e) Penerapan aspek transparansi di sekolah melalui penyediaan akses informasi berupa website sekolah serta penyediaan papan-papan informasi di sekolah. (f) Penerapan aspek akuntabilitas dijalankan melalui proses laporan pertanggungjawaban secara administratif yang dilaporkan secara berkala kepada dinas pendidikan terkait, serta pelaporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan dalam rapat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

**Kata Kunci:** MBS

## **PENDAHULUAN**

MBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan sekolah tetapi harus tetap pada koridor arah kebijakan pendidikan nasional. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu melalui orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pula pada partisipasi masyarakat yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Terdapat tujuh komponen pengelolaan manajemen berbasis sekolah, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan dalam hal pengelolaan manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah yang didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah yakni: otonomi dan kemandirian, partisipasi, kemitraan sekolah, transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip otonomi dan kemandirian di sekolah akan mampu berjalan

dengan semestinya apabila didukung oleh sejumlah kemampuan, seperti kemampuan mengambil keputusan terbaik, kemampuan memecahkan persoalan sekolah, maupun kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri bersama dengan stake holder pendidikan yang ada. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya manusia maupun sumber daya peralatan, perlengkapan, perbekalan, dana dan bahan/material (surya Darma, 2010:24).

Pelaksanaan Otonomi didasarkan pada indikator pengelolaan kurikulum (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi). Pengelolaan kurikulum dilaksanakan oleh sekolah yang secara teknis dilaksanakan oleh tim pengembang kurikulum sekolah dengan melibatkan komponen dari pihak komite sekolah dan juga dari pihak mitra sekolah dalam hal ini dunia usaha/industri yang terlibat dalam pengembangan pendidikan di sekolah. Penerapan kemandirian sekolah merupakan kewenangan yang diberikan kepada sekolah dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan sekolahnya. Sehubungan dengan ini maka sekolah harus didukung oleh sumberdaya sekolah tersebut diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan/dana sekolah.

Meskipun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

penerapan prinsip otonomi dan kemandirian di SMK Negeri 1 Luwu Timur menunjukkan keterlaksanaan namun masih belum sepenuhnya memenuhi harapan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ditemukan fakta bahwa dalam penyusunan naskah kurikulum belum sepenuhnya melibatkan komponen dari pihak mitra sekolah berdasarkan susunan tim pengembang kurikulum yang ada. Kemudian dalam penerapan prinsip kemandirian, meski telah mampu memenuhi kebutuhannya terkait sumber daya tenaga pendidikan, prasarana pendidikan. Namun belum mampu memenuhi kebutuhan sekolahnya terkait sarana peralatan laboratorium praktek keahlian yang menunjang proses pembelajaran di sekolah.

Partisipasi masyarakat luas, seperti kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat dan organisasi pemerhati pendidikan dengan upaya-upayanya yang dapat dilakukan mulai pada tahap perumusan kebijaksanaan implementasi kebijaksanaan secara operasional serta evaluasi dan pengawasan dan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan sekolah.

Penerapan partisipasi dan kemitraan sekolah merupakan wujud pemberdayaan masyarakat sebagai daya dukung sekolah dalam pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien agar seoptimal mungkin sasaran dan tujuan sekolah dapat tercapai. Pelaksanaan partisipasi dan kemitraan di sekolah menurut Cohen dalam Irene (2019:39) membedakan partisipasi sebagai berikut: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. Dalam pengelolaan kurikulum di sekolah utamanya dalam pendidikan vokasi keterlibatan masyarakat dan mitra sekolah dibutuhkan baik itu dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pelaksanaan kurikulum, dan partisipasi dalam evaluasi program kemitraan serta partisipasi kemanfaatan yang saling menguntungkan antara pihak sekolah dengan masyarakat/mitra.

Dalam penerapan partisipasi dan kemitraan di SMK Negeri 1 Luwu Timur dalam pengelolaan kurikulum sekolah

berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pada dasarnya beberapa komponen partisipasi dan kemitraan seperti yang disebutkan di atas tidak berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan partisipasi dalam hal pengambilan keputusan di sekolah dimana tidak sepenuhnya mitra terlibat dalam hal pengembangan kurikulum di sekolah. Pelaksanaan kemitraan sekolah lebih kepada pelaksanaan praktek kerja industri saja dan belum menyentuh pada hal-hal lain misalnya partisipasi mitra (dunia usaha/industri sebagai guru tamu di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran praktik di sekolah, serta partisipasi kemanfaatan dimana sekolah sebagai penyedia tenaga kerja bagi mitra sekolah).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik dan berkeinginan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah diterapkan di SMK Negeri 1 Luwu Timur utamanya dalam penerapannya pada manajemen pengelolaan kurikulum sekolah sebagai jantung pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kehadiran manajemen berbasis sekolah adalah untuk mendorong sekolah menjadi berkualitas, kreatif dan inovatif dalam mendorong terwujudnya tujuan pendidikan. Serta memberikan kebebasan bagi sekolah untuk lebih mengembangkan sekolahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Penerapan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih kreatif, inisiatif, dan inovatif dalam meningkatkan kinerja sekolah. Penerapan prinsip kemandirian, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolah. Penerapan prinsip partisipasi dan kemitraan menjadikan tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak sekolah, serta meningkatkan rasa kepemilikan dedikasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sekolah.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan aspek otonomi dan kemandirian pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur?; (2) bagaimana penerapan

aspek partisipasi dan kemitraan pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur?; (3) bagaimana penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur?; (4) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan manajemen berbasis sekolah pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur? Sementara Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan penerapan aspek otonomi dan kemandirian dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur, (2) menjelaskan penerapan aspek partisipasi dan kemitraan dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur, (3) menjelaskan penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur, (4) menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan manajemen berbasis sekolah pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur.

## **METODE**

Penelitian ini mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur Kecamatan Malili ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran atau deskripsi suatu peristiwa secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta guna memperoleh suatu kesimpulan (Sugiyono: 2011).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Luwu Timur Kecamatan Malili. Penelitian ini berfokus pada empat persoalan utama, yakni: (1) penerapan aspek otonomi dan kemandirian, (2) penerapan aspek partisipasi dan kemitraan, (3) penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas, (4) faktor-faktor pendukung

dan penghambat penerapan manajemen berbasis sekolah.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMK Negeri 1 Luwu Timur yang dapat memberikan informasi yang berkenaan dengan penerapan aspek-aspek manajemen berbasis sekolah pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2011), hal utama yang dapat memengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Oleh karena itu, mengumpulkan data penelitian harus dirancang sedemikian rupa agar penelitian menghasilkan data yang valid dan akurat. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ditempuh beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara; (2) observasi; dan (3) dokumentasi.

Instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Kehadiran peneliti dalam penelitian sangat penting dan menjadi kunci diperolehnya data yang valid dan akurat, karena peneliti sendiri yang secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sugiyono (2011:305) mengatakan bahwa “instrumen atau alat dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (human instrument)”, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis dalam bentuk pedoman wawancara, lembar observasi dan telaah dokumentasi yang dapat dijadikan

sebagai penuntun bagi peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan tentang penerapan manajemen berbasis sekolah pada pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur.

Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) triangulasi: Triangulasi adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber, subjek peneliti, cara (teori, metode, teknik) dan waktu. Triangulasi ini dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh sebelumnya dengan mencari informasi lain dari beberapa orang informan lainnya sebagai pembanding; (2) *member check*: Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya disebut valid sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Data yang sudah dianalisis di cross check kembali kepada informan agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh peneliti menggunakan analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah suatu teknik penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan penyusunan data dan dianalisis sehingga diperoleh data yang jelas. Analisis terhadap data kualitatif ini terdiri dari

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian yang telah dianalisis, maka penerapan manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur terdiri dari penerapan aspek otonomi, kemandirian, partisipatif, kemitraan, transparansi, akuntabilitas dapat disajikan sebagai berikut:

### 1. Penerapan aspek otonomi dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur

#### a. Kewenangan sekolah dalam pengelolaan kurikulum dan program pembelajaran

Sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya dan program pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengembangan kurikulum dan program pembelajaran meliputi pengembangan buku I KTSP, pengembangan silabus dan RPP, Persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan inti dan informan pelengkap dalam pelaksanaan kewenangan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran sudah berjalan dengan baik.

Hal tersebut ditunjukkan melalui tahapan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Luwu Timur, serta muatan yang terkandung dalam kurikulum yang dibuat sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan menengah kejuruan oleh direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2017, Permendikbud No. 70 Tahun

2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, dan Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum merupakan salah satu proses pelaksanaan otonomi dalam pengembangan kurikulum sekolah. Pengembangan kurikulum SMK/MAK dikembangkan secara tim di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan. Pengembangan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur telah dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang di tandai melalui surat keputusan kepala sekolah. tim pengembang kurikulum di sekolah meliputi para stake holder sekolah dengan melibatkan komite sekolah serta dunia usaha/industri yang terlibat dalam kemitraan sekolah.

Dalam proses pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan adanya pembagian tugas pada setiap komponen tim pengembang kurikulum yang mana berperan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sebagai model pendidikan vokasi langkah sekolah dalam melibatkan elemen masyarakat baik itu komite sekolah dan pihak dunia usaha/industri merupakan langkah yang tepat guna menghasilkan tenaga kerja. Hanya saja dalam proses pelibatan elemen tersebut haruslah sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya. Peneliti menemukan proses pelibatan yang dilakukan oleh SMK negeri 1 Luwu Timur utamanya dalam proses penentuan bidang-bidang kerja tim pengembang kurikulum bahwasanya ada penempatan dunia usaha/industri yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya sehingga akan

berpengaruh pada perkembangan bidang keahlian yang terdapat di sekolah.

Adapun hal yang di maksud di atas adalah penempatan dunia usaha/industri sebagai tim pengembang bidang keahlian geologi pertambangan yang menempatkan mitra usaha/industri yang bergerak dalam bidang teknik penjualan dan teknik perbengkelan kendaraan bermotor. Hal ini merupakan kebijakan yang kurang tepat bahkan dapat dikatakan keliru.

Pengembangan kurikulum sekolah terdiri dari pengembangan buku I, buku II dan buku III. Pengembangan buku I K-13 dilakukan oleh tim pengembang kurikulum yang dikukuhkan sekolah dalam bentuk surat keputusan (SK) kepala sekolah SMK Negeri 1 Luwu Timur. Adapun tim pengembang kurikulum SMK Negeri 1 Luwu Timur terdiri dari kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, guru, komite sekolah, dan pihak yang mewakili dunia usaha/dunia industri. Pengembangan silabus, RPP dan persiapan pembelajaran dikembangkan oleh masing-masing guru mata pelajaran atau MGMP sekolah dibawah koordinasi wakil kepala sekolah bidang kurikulum.

Ditinjau dari pengembangan kurikulum, menunjukkan bahwa SMK Negeri 1 Luwu Timur sudah mandiri dalam mengembangkan kurikulum sekolah dengan melibatkan peran serta orang tua dan dunia usaha/dunia Industri. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB XV pasal 54 yang menyatakan peran serta masyarakat dalam pendidikan termasuk orang tua, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, pengusaha dalam penyelenggaraan dan pengendalian layanan pendidikan, masyarakat dapat berperan sebagai pelaksana

dan pengguna hasil pendidikan. Kemudian Permendikbud RI No. 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Pada BAB I Pasal 1 ayat 1 menyatakan pelibatan keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan dokumen kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur juga mengacu pada lampiran VII Permendikbud No. 34 tahun 2018 tentang pengelolaan Bab I bagian B point 2 menyebutkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah dalam menentukan kebijakan pengelolaan dengan melibatkan partisipasi langsung pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada bagian D point 7 pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu internal ditegaskan bahwa SMK membentuk tim yang melaksanakan fungsi pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu internal. Pengembangan kurikulum wajib melibatkan dunia usaha/industri.

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan utama satuan pendidikan dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi sekolah dalam upaya pengembangan mutu pendidikan di sekolah. SMK Negeri 1 Luwu Timur memberikan kebebasan kepada para pendidik untuk memilih strategi, dan metode, dan teknik pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan sumberdaya yang tersedia di sekolah.. berdasarkan informasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dan persiapan

pembelajaran di SMK Negeri 1 Luwu timur bahwa guru telah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi serta memanfaatkan berbagai fasilitas dan atau media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Hal tersebut telah dijelaskan pada Bab III lampiran III permendiknas No.34 Tahun 2018 tentang standar proses pembelajaran untuk sekolah menengah kejuruan. Dalam Permendiknas tersebut digambarkan bahwa proses pembelajaran memiliki tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan guru membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP dan/atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus yang dikembangkan oleh SMK/MAK dan kurikulum. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran guru mengikuti langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP/perangkat pembelajaran yang telah di buat. Kemudian tahap penilaian proses pembelajaran yang dilakukan untuk menilai/mengukur pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil penilaian pembelajaran digunakan untuk merencanakan program perbaikan pembelajaran, pengayaan, dan layanan konseling untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik.

- b. Pihak yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum.

pengembangan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur melibatkan pihak orang tua serta dunia usaha/dunia industri dalam tim pengembang kurikulum sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah di kukuhkan dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah yang mana terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai ketua tim pengembang kurikulum,

ketua komite sebagai perwakilan dari orang tua sebagai anggota tim pengembang kurikulum, dunia usaha/dunia industri dan dinas kominfo (mitra dudi) sebagai tim pengembang kurikulum terkait bidang keahlian di sekolah. kepala laboratorium sebagai koordinator tim pengembang kurikulum sesuai dengan bidang keahliannya. Guru sebagai koordinator bidang mata pelajaran masing-masing.

Pelibatan orang tua dan masyarakat dalam tim pengembang kurikulum juga sesuai dengan yang dijabarkan dalam pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pendidikan menengah kejuruan, direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan, kementerian pendidikan dan kebudayaan 2017. Dalam pedoman penyusunan KTSP tersebut dijelaskan bahwa KTSP SMK/MAK dikembangkan secara tim di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan. Tim pengembang KTSP SMK/MAK terdiri atas : ketua kompetensi keahlian, kelompok guru kompetensi keahlian, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang humas, dan kepala sekolah. dalam kegiatan pengembangan KTSP SMK, tim pengembang melibatkan komite sekolah, pengawas, nara sumber ahli pendidikan teknologi dan kejuruan, ahli materi kompetensi keahlian, praktisi dunia kerja, dan pihak lain yang terkait.

## **2. Penerapan aspek kemandirian dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur**

### **a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.**

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan

berlangsung secara baik, dan pada akhirnya tujuan sekolah tidak akan tercapai. Sekolah yang mandiri harus memiliki tingkat kesiapan sumberdaya yang memadai untuk menjalankan proses pendidikan. Artinya, segala sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam keadaan siap.

Secara kuantitas, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Luwu Timur sudah mencukupi. Data guru berjumlah 45 orang yang terdiri dari; 33 orang guru aparatur sipil negara dan 12 orang guru honorer. Dengan pembagian tugas sebagai berikut; 3 orang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 3 orang guru mata pelajaran PJOK dan muatan lokal, 3 orang guru mata pelajaran matematika, 2 orang guru mata pelajaran PKN, 1 orang guru simulasi digital, 3 orang mata pelajaran bahasa inggris, 1 orang guru mata pelajaran gambar teknik, 1 orang guru mata pelajaran teknologi WAN, 1 orang guru Kimia, 2 orang guru fisika, 1 orang guru mata pelajaran dasar perancangan teknik, 1 orang guru mata pelajaran teknik pengeboman dan pengeboran, 1 orang guru mata pelajaran dasar-dasar geologi, 5 orang guru mata pelajaran agama dan budi pekerti, 2 orang guru mata pelajaran produk kreatif, 1 orang guru mata pelajaran sistem komputer, 1 orang guru mata pelajaran administrasi sistem jaringan, 3 orang guru mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan, pemeliharaan sasis dan pemeliharaan mesin, 1 orang guru mata pelajaran pemrograman dasar otomotif, 1 orang guru seni budaya. Selain guru, SMK Negeri 1 Luwu Timur juga dibantu oleh 8 orang tenaga administrasi.

Kualifikasi pendidik di SMK Negeri 1 Luwu Timur, keseluruhan pendidik di SMK negeri 1 Luwu



Timur telah memenuhi standar kualifikasi guru sesuai dengan isi lampiran V, Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal, standar kualifikasi akademik guru SMK adalah jenjang pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang guru pendidikan sedikitnya yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah sarjana (S1) atau sarjana terapan (D-IV) yang relevan. Pendidik yang melaksanakan tugas di sekolah telah keseluruhan telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) dan beberapa telah memiliki sertifikat pendidik

Kemudian pada kompetensi pedagogik, sebagian guru telah mampu merencanakannya, melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Sementara itu sekolah juga terus mengarahkan dan melaksanakan pembimbingan kepada guru-guru di sekolah baik itu pembimbingan melalui proses pelatihan/diklat dan atau proses pembimbingan yang dilakukan dalam kelompok MGMP sekolah serta pendampingan proses penyusunan melalui komunikasi media sosial.

- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan kemandirian di sekolah salah satunya adalah

kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhannya akan sarana dan prasarana. Data mengenai sarana dan prasarana ini diambil dari Laporan Data Analisis Kondisi Lingkungan Sekolah pada SMKN 1 Luwu Timur. Dalam laporan dinyatakan bahwa sarana dan prasarana sekolah sudah memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia terdiri dari 2 unit kantor, 1 unit ruang guru, 1 unit aula, 1 ruang mushollah, 1 unit perpustakaan, 1 unit UKS, 1 unit ruang galeri, 31 ruang kelas dengan ukuran 9 x 7,5 m<sup>2</sup> dan 4 WC serta 1 gedung kebersihan. Terdapat pula 11 unit laboratorium yang terdiri dari laboratorium fisika, kimia, otomotif, tambang, TKJ, TKR, KKPI dan pengelasan. SMKN 1 Luwu Timur memiliki 9 unit Laptop, memiliki 5 unit LCD Projector, 48 unit komputer, telepon, faximile, mesin riso, mesin fotocopy, koleksi buku-buku referensi di perpustakaan dinyatakan belum lengkap, memiliki kelengkapan alat praktik untuk semua kejuruan seperti alat praktik las, alat praktik mesin perkakas, alat praktik K3, alat praktek ilmu ukur tanah, alat praktik gambar teknik. Memiliki meja dan kursi guru dan siswa dinyatakan memenuhi jumlah guru dan siswa, papan tulis, lemari di setiap ruangan, daya listrik yang tersedia memenuhi kebutuhan sekolah, ventilasi tiap ruangan juga sudah memenuhi standar. Terdapat pula lapangan voli, sepak takraw, tenis meja, dan lapangan basket.

Kebutuhan SMK Negeri 1 Luwu Timur dari segi prasarana sudah cukup memadai sesuai dengan kriteria standar prasarana dalam lampiran VI Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang standar sarana dan prasarana. Bangunan sekolah berada di lokasi yang aman dan nyaman, terhindar dari kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan

kenyamanan. Kenyamanan bangunan sekolah juga terlihat dari adanya ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pendidikan selain keberadaan lahan bangunan juga ditunjang oleh ketersediaan ruang pembelajaran umum, ruang khusus (praktek), dan ruang penunjang sekolah.

### **3. Penerapan aspek partisipasi dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur.**

Partisipasi masyarakat merupakan wujud pemberdayaan masyarakat sebagai daya dukung sekolah dalam rangka pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien agar seoptimal mungkin sasaran dan tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai. Dalam lampiran VII Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang Standar pengelolaan mengungkapkan bahwa partisipatif merupakan keikutsertaan semua pemangku kepentingan/ekosistem satuan pendidikan dalam mengelola satuan pendidikan dan insidental dapat berbentuk sumbangan tenaga, dana, dan sarana prasarana, serta bantuan teknis, dan membagikan pengalaman dan praktik baik kepada SMK/MAK berbagai proses atau strategi yang terkait dengan penanaman dan penumbuhan karakter sehingga orang tua juga dapat dijadikan teladan dalam penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan partisipasi di SMK Negeri 1 Luwu Timur ditandai dengan adanya pembentukan komite sekolah yang dikukuhkan dalam surat keputusan kepala sekolah. Berdasarkan dokumen komite sekolah di SMK Negeri 1 Luwu Timur memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, pendukung, baik yang terwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan, pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

keluaran pendidikan di satuan pendidikan, mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Kemudian dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pasal 3 mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya komite sekolah bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumberdaya pendidikan lainnya dari masyarakat, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh pelaksanaan partisipasi di SMK Negeri 1 Luwu Timur, pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah telah dijalankan dengan baik sesuai dengan perannya, baik yang tertuang dalam dokumen surat keputusan kepala sekolah maupun yang tertuang dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Pelaksanaan partisipasi di SMK Negeri 1 Luwu Timur dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Peran Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan khususnya dilihat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kurikulum sekolah yang ditunjukkan dalam keterlibatan komite sekolah dalam tim pengembang kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum komite sekolah bertugas sebagai pemberi pertimbangan, masukan, dan usulan, baik dalam penentuan visi misi, program sekolah dan lain sebagainya.

Peran komite sekolah sebagai pendukung ditunjukkan dalam bentuk dukungan dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah. Dukungan dalam bentuk pemikiran dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan, memberi masukan, usulan, pertimbangan dalam penyusunan

kurikulum di sekolah, pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program di sekolah. Dukungan dalam finansial di tunjukkan melalui melengkapi kebutuhan anak dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah, bantuan dalam membiayai tenaga honorer di sekolah. Komite sekolah juga menjadi mediator pelaksanaan kemitraan sekolah dengan dunia usaha/industri.

#### **4. Penerapan aspek kemitraan dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur.**

Kemitraan sekolah dengan dunia usaha/industri ini mengacu kepada Permen Perindustrian No. 03/M-IND/PER/1/2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri. Peraturan menteri ini sebagai pedoman bagi SMK dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri dan untuk pembinaan dan pengembangannya difasilitasi oleh perusahaan usaha dan Industri. program keahlian pada SMK disesuaikan dengan kebutuhan industri. Atas dasar tersebut program kemitraan sekolah diharapkan membawa dampak yang positif untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada dan meningkatkan skill dan pengalaman siswa guna untuk bersaing di era global saat ini.

##### **a. Program kemitraan sekolah dengan dunia usaha/industri.**

SMK Negeri 1 Luwu Timur memiliki program yang bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan. salah satu program tersebut yaitu kemitraan sekolah dengan dunia usaha/industri. kerjasama tersebut menjadi salah satu aspek guna meningkatkan kualitas peserta didik dan memberikan pengalaman kerja yang nantinya dapat membekali pengalaman kerja yang nantinya dapat membekali pengalaman di saat siswa telah terjun ke dunia usaha/industri.

##### **b. Implementasi**

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti dalam proses wawancara yang dilakukan, pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Luwu Timur lebih menekankan pada pelaksanaan praktek kerja industri. Tahapan yang dilakukan sekolah di mulai pada tahap pengajuan proposal pelaksanaan praktek kerja industri, kemudian penempatan siswa pada dunia usaha/industri dalam pelaksanaan prakerin dan evaluasi pelaksanaan prakerin. Dalam pelaksanaan prakerin di perlukan adanya proses monitoring yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah, akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak mitra sekolah, hal ini jarang dilaksanakan.

Bentuk kemitraan sekolah dengan dunia usaha/industri juga ditunjukkan melalui dukungan material berupa sejumlah peralatan laboratorium praktek, serta pelaksanaan even-even kemitraan yang dapat meningkatkan pengalaman dan kompetensi peserta didik sesuai dengan bidang keahlian yang digeluti.

Berdasarkan pembahasan di atas, peran serta masyarakat dan mitra sekolah bertujuan dalam upaya pengembangan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Luwu Timur dan sebagai wujud kepedulian masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Luwu Timur pada umumnya dan di SMK Negeri 1 Luwu Timur pada khususnya. Hal ini sesuai dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh Kuncoro (2010:4) yang menyatakan bahwa kemitraan sekolah dengan lembaga lain dalam masyarakat bertujuan : untuk membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan, memperkaya pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam bermacam-macam setting kehidupan,

mendekatkan kegiatan belajar siswa dengan konteks riil kehidupan sehari-hari, membantu sekolah untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat bagi kegiatan pendidikan, dan lain-lain.

c. Kriteria pemilihan mitra sekolah.

Kriteria yang ditetapkan oleh SMK Negeri 1 Luwu Timur dalam melakukan kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri diperoleh informasi bahwa dalam memilih mitra kerjasama ada tiga kategori mendasar yakni: pemilihan mitra kerjasama memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang terdapat di sekolah. Hal ini mengartikan bahwa dalam menentukan mitra didasari oleh ketersediaan bidang keahlian yang terdapat di sekolah. Hal ini bertujuan bahwa dalam hubungan kerjasama nantinya menjadi prioritas utama adalah bahwa peserta didik akan mampu meningkatkan kompetensi diri dan pengetahuannya karena peserta didik telah memperoleh pengetahuan dasar di sekolah.

Kriteria selanjutnya, bahwa dunia industri/dunia usaha tersebut telah memiliki pengalaman dalam bidangnya serta fasilitas perlengkapan yang baik. Hal ini mensyaratkan bahwa dalam memilih mitra sekolah, dunia usaha/dunia industri dikategorikan sebagai dunia usaha/dunia industri yang mapan artinya bahwa dunia usaha/dunia industri tersebut telah lama berkecimpung dalam bidang tersebut sehingga memiliki pengetahuan yang tinggi dalam memberikan pengalaman kerja bagi peserta didik. Selain itu hal ini juga berarti bahwa dunia usaha/dunia industri tersebut memiliki peralatan baru dan terbarukan sehingga peserta didik nantinya akan memperoleh pengetahuan baru dalam pemanfaatan peralatan dibandingkan peralatan yang telah mereka pelajari di sekolah.

Lokasi dari dunia usaha/dunia industri dapat dijangkau. Artinya bahwa dalam kategori ini mitra sekolah berada dalam kestuan wilayah dengan SMK Negeri 1 Luwu Timur. Hal ini bertujuan bahwa dengan jarak lokasi mitra yang dapat dijangkau akan memberikan kemudahan dalam akses berkoordinasi sehingga proses dan tujuan kegiatan kerjasama dapat terorganisir dengan baik selain itu akan memberikan keuntungan tersendiri diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan informasi di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam kriteria pemilihan mitra sekolah yang diterapkan oleh SMK Negeri 1 Luwu Timur memiliki tujuannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Prosser dan Quigley (1950) dalam *model kemitraan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri* (Purnamawati, Muhammad Yahya : 2019. Badan penerbit UNM) yang memaparkan mengenai karakteristik pendidikan kejuruan yakni: pendidikan kejuruan akan efektif jika siswa diajar dengan materi, alat, mesin, dan tugas-tugas yang sama atau tiruan dimana siswa akan bekerja dan efisien apabila disediakan dengan lingkungan yang sesuai dengan lingkungan dimana nanti mereka akan bekerja, latihan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas-tugas yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasional, dengan peralatan yang sama dan dengan mesin-mesin yang sama dengan yang dipergunakan di dalam kerjanya kelak.

Informasi hasil penelitian di atas juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Majid (2012) yang berpendapat bahwa fungsi pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan siswa menjadi tenaga produktif antara lain: (1) memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan dunia industri; (2) menciptakan lapangan kerja bagi

dirinya dan orang lain; dan (3) merubah status siswa dari ketergantungan menjadi produktif.

Berdasarkan informasi mengenai kriteria pemilihan mitra yang ditetapkan oleh SMK Negeri 1 Luwu Timur nampak jelas memiliki tujuan yang sejalan dengan karakteristik dan fungsi dari pendidikan kejuruan yang dikemukakan oleh kedua teori di atas.

- d. Strategi sekolah dalam menjalin kemitraan.

Strategi merupakan suatu rencana yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi diperlukan agar dalam pelaksanaan kerjasama antara sekolah dan masyarakat maupun dunia usaha dan dunia industri berjalan dengan lancar.

Strategi SMK Negeri 1 Luwu Timur dalam menerapkan kemitraan sekolah membagi dalam dua kategori yakni:

Dalam mewujudkan jalinan kerjasama dengan mitra baru strategi yang digunakan oleh SMK Negeri 1 Luwu Timur adalah: Mengumpulkan informasi dari berbagai elemen stake holder, masyarakat dan pemerintahan dalam upaya mengumpulkan informasi terkait instansi yang memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang dimiliki sekolah. Hal ini bertujuan agar dalam pemilihan mitra nantinya benar-benar dapat tepat dan dapat memberikan pengalaman dunia kerja dan tambahan pengetahuan serta keterampilan peserta didik, mengefektifkan komunikasi. Hal ini dalam upaya menarik perhatian dan keinginan calon mitra sekolah untuk mau menjalin kerjasama dengan sekolah dalam upaya pengembangan pendidikan di Luwu Timur. Hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan sekolah kepada masyarakat dan dunia usaha dunia

industri tentang keunggulan-keunggulan sekolah, melakukan analisis kebutuhan terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk dapat menyatukan visi dan misi serta tujuan masing-masing pihak agar dalam proses kerjasama nantinya tidak ada kepentingan yang dirugikan, membuat kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) hal ini dilakukan agar bentuk kerjasama memiliki kekuatan hukum dan juga diatur tentang bentuk-bentuk dan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Keberadaan mitra sekolah merupakan aset yang perlu dijaga dan dipertahankan. Dalam menjaga dan mempertahankan kemitraan sekolah SMK Negeri 1 Luwu Timur menerapkan strategi sebagai berikut: Melakukan analisis kompetensi siswa untuk ditempatkan pada mitra kerja, Menjalin koordinasi dan rapat kerja terkait pelaksanaan kegiatan,.

Hal tersebut di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunida Cahya Kinanti dengan judul “ Kemitraan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta, 2016). Penelitian tersebut menyatakan bahwa kerjasama dalam bentuk kemitraan sekolah membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi calon mitra sekolah. kemudian dijelaskan pula bahwa untuk mendapatkan kesempatan menjadi wakil sekolah dalam program kemitraan tidaklah mudah. Berbagai proses dilalui mulai dari proses seleksi yang bertahap sampai pada faktor pendukung lain yaitu ketersediaan pendanaan. MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan bentuk kesepakatan yang telah diperoleh. Menjaga komunikasi dengan mitra dalam upaya mempertahankan kepercayaan yang terjalin dalam

kerjasama.

Selain menjalin komunikasi dan saling percaya dengan mitra, strategi pelaksanaan kemitraan yang dilakukan SMA Negeri 2 Yogyakarta sebagai langkah tindak lanjut dari program adalah evaluasi. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi lisan dan tertulis. Evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah supaya kegiatan kerjasama yang dilakukan pada tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

Hasil penelitian di SMK Negeri 1 Luwu Timur terkait partisipasi dan kemitraan sekolah telah dijalankan secara umum terlaksana dengan baik walaupun dari beberapa sub indikator masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan aspek partisipasi dan kemitraan yang dilakukan pihak sekolah juga telah di gambarkan dalam lampiran VII Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang standar pengelolaan yang mengatakan bahwa keikutsertaan semua pemangku kepentingan/ekosistem satuan pendidikan dalam mengelola satuan pendidikan dan pembuatan keputusan, dapat dilakukan melalui prosedur formal; atau insidental dapat berbentuk sumbangan tenaga, dana, dan sarana dan prasarana, serta bantuan teknis, dan membagikan pengalaman dan praktik baik kepada SMK berbagai proses atau strategi yang terkait dengan penanaman dan penumbuhan karakter sehingga orang tua juga dapat dijadikan teladan dalam penguatan pendidikan karakter di SMK. Jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi, maupun dunia usaha/industry, yang dalam hal ini SMK dan masyarakat dalam posisi sejajar untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya bekerjasama dengan komunitas orang tua peserta didik, lembaga pemerintahan,

komunitas masyarakat sipil penggiat pendidikan, komunitas keagamaan.

## **5. Penerapan aspek transparansi dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur.**

### **a. Sistem Informasi**

Salah satu bentuk sistem informasi yang diterapkan SMK Negeri 1 Luwu Timur adalah melalui komunikasi langsung baik itu melalui pertemuan-pertemuan dan atau rapat dalam proses dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan kemitraan sekolah. selain itu komunikasi langsung juga dilakukan dalam memberikan informasi kepada orang tua siswa terkait perkembangan dan atau pelaksanaan tata tertib di sekolah. hal ini sebagai bentuk keterbukaan sekolah terhadap proses pelaksanaan pendidikan dan program kegiatan di sekolah dalam proses pelaksanaan kurikulum.

Bentuk keterbukaan SMK Negeri 1 Luwu Timur juga dilakukan dengan pelibatan orang tua siswa dan dunia usaha/dunia industri. pelibatan orang tua dilakukan dalam bentuk komite sekolah dan tim pengembang kurikulum, sementara pelibatan masyarakat, dalam hal ini dunia usaha/dunia industri, dilakukan dalam tim pengembang kurikulum. Pelibatan orang tua dalam komite diatur dalam permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Selanjutnya pasal 2 menyatakan bahwa: (1) komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah; (2) komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan; (3) komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Sementara itu hubungan kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri menurut PP No.17 Tahun 2013 memberikan batasan pengertian kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha.

Website sekolah sekolah adalah bentuk penyebaran informasi melalui media online. Sistem informasi ini memberikan peluang besar bagi khalayak untuk mendapatkan informasi mengenai SMK Negeri 1 Luwu Timur. Dengan adanya website ini sekolah mencoba melakukan keterbukaan untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap SMK negeri 1 Luwu Timur. Penerapan sistem informasi disekolah untuk memudahkan akses layanan informasi terkait dengan manajemen dan perkembangan sekolah kepada orang tua peserta didik maupun stake holder pendidikan dan masyarakat.

Bentuk sistem informasi lain yang diterapkan SMK Negeri 1 Luwu Timur adalah dalam bentuk telekomunikasi berupa telepon email, dan juga sms. Penyediaan sistem informasi ini dalam rangka memudahkan orang tua dalam memperhatikan perkembangan peserta didik. serta terjalinnya komunikasi dua arah diharapkan mampu memberikan nilai tambah tersendiri dalam kerjasama sebagai upaya mengembangkan pembelajaran bagi peserta didik.

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan, pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari publik.

Dalam memfasilitasi orang tua, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri dibutuhkan langkah dalam prosesnya. Kepercayaan masyarakat menjadi penting dalam membangun

keterbukaan olehnya itu dibutuhkan mekanisme dalam pengelolaannya. Dalam memfasilitasi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam upaya membangun keterbukaan sekolah SMK Negeri 1 Luwu Timur menerapkan beberapa mekanisme yang dapat di tempuh. Pertama adalah melalui komunikasi langsung dengan pihak sekolah. Terkait hal ini pencari informasi dapat mendatangi sekolah dan berhubungan secara langsung dengan stake holder sekolah sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin diperolehnya. Namun hal itu harus sesuai dengan tata tertib dan aturan yang berlaku di SMK Negeri 1 Luwu Timur. Kedua yakni melalui jalur telekomunikasi, akses ini dapat melalui telepon, email, sms, dapat juga melalui jalur mediasosial

## **6. Penerapan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan kurikulum.**

- a. Mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan kurikulum sekolah.

Mekanisme akuntabilitas dalam penyusunan kurikulum SMK Negeri 1 dimulai dengan pembentukan tim pengembang kurikulum sekolah yang melibatkan orang tua (komite sekolah) dan dunia usaha/dunia industri yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah tentang penetapan tim pengembang kurikulum dengan Nomor: 421.5/376 – UPT.SMKN.1/LUTIM/DISDIK.

Selanjutnya bentuk akuntabilitas yang dilakukan sekolah adalah melalui sosialisasi draft kurikulum yang telah dibuat tim pengembang kurikulum kepada orang tua, dan masyarakat yang peduli pendidikan serta dinas terkait. Tahap terakhir pelaksanaan akuntabilitas dalam penyusunan kurikulum adalah pengesahan kurikulum oleh dinas pendidikan yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala SMK Negeri 1 Luwu Timur.

Dalam pelaksanaan pengajaran, peningkatan pembelajaran serta pengembangan peserta didik menjadi hal yang wajib diketahui oleh orang tua siswa. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam memberikan informasi terkait hal tersebut SMK Negeri 1 Luwu timur menempuh beberapa mekanisme. Dalam hal perkembangan pembelajaran peserta dilakukan oleh guru dan atau wali kelas masing-masing bidang keahlian baik itu dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan orang tua siswa secara berkala dan atau melalui media sosial. Kemudian dalam pelaksanaan tata tertib sekolah pelaporan juga dilakukan baik itu melalui wali kelas, dan atau guru bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah bidang humas dan kesiswaan. Terkait dengan pengembangan proses pembelajaran dilakukan juga pelaksanaan supervisi bagi tenaga pendidik yang dilakukan secara berkala bersama dengan dinas pendidikan.

Mekanisme penerapan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kurikulum bersama dengan mitra sekolah adalah pelaksanaan praktek kerja industri (prakerin) dalam pelaksanaan prakerin dilakukan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan praktek kerja industri. Kemudian pelaksanaan program kegiatan lain bersama mitra kerja dilakukan dalam bentuk SK kepanitiaan kegiatan, kemudian pelaporan pertanggungjawaban kegiatan baik dalam bentuk administratif dan juga rapat pelaporan pertanggung jawaban.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, Depdiknas (2009: 45) menjelaskan bahwa akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Dengan demikian akuntabilitas sekolah

adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di SMK Negeri 1 Luwu Timur sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2001: 16) bahwa keterbukaan sekolah ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat control dalam hal ini keterlibatan komite sekolah dan dunia usaha/industri dalam pengembangan kurikulum dan perumusan program sekolah. Keberhasilan akuntabilitas sekolah adalah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan public terhadap sekolah.

## **7. Faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur.**

Implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK negeri 1 Luwu Timur dipengaruhi oleh beberapa aspek yang membantu terwujudnya hal tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung penerapan manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Luwu Timur utamanya dalam manajemen pengelolaan kurikulum sekolah adalah:

- a. Setiap komponen pengembangan kurikulum sekolah memahami peran dan fungsinya masing-masing, sehingga dalam proses pengembangan kurikulum di sekolah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seperti dalam hal penyusunan kurikulum, tim pengembang kurikulum melakukan penyusunan kurikulum dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab yakni kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menetapkan kurikulum yang telah disusun dan selanjutnya disahkan oleh dinas pendidikan terkait. dilihat dari prosesnya, pengembangan kurikulum telah berjalan sistematis



- dan terstruktur sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- b. Dalam pelaksanaan dan atau penerapan kurikulum didukung oleh ketersediaan sumber daya yang mumpuni. Ketersediaan sumber daya yang dimaksud adalah dari segi sumber daya tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Luwu Timur telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan dimana seluruh tenaga pendidik di sekolah memiliki kualifikasi S1. Selanjutnya sumber daya sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung keterlaksanaan program kurikulum dan pembelajaran di sekolah.
  - c. Terjalannya komunikasi yang baik antara sekolah dengan berbagai pihak. Terjalannya komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Mengefektifkan komunikasi merupakan langkah dalam merekrut dan atau menarik perhatian mitra sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan di SMK Negeri 1 Luwu Timur. Terjalannya komunikasi yang baik dengan semua pihak memudahkan terjalannya kerjasama dan dengan komunikasi yang baik dapat meningkatkan peran aktif semua elemen untuk mau berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan di SMK Negeri 1 Luwu Timur.
  - d. Ketersediaan sarana dan prasana. Sebagai sebuah sekolah kejuruan ketersediaan sarana dan prasana merupakan salah satu faktor yang mendukung pengembangan pendidikan sekaligus menjadi faktor yang dapat membantu terlaksananya program kemitraan sekolah. Kemitraan sekolah terlaksana dan juga dapat berkelanjutan dikarenakan sumberdaya peserta didik memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh instansi, masyarakat, dan terkhusus dunia usaha/dunia industri dalam program

kerjasama yang akan dan atau terjalin. Ketersediaan sarana dan prasana di SMK Negeri 1 Luwu Timur dapat dikategorikan baik, sehingga pengembangan kompetensi peserta didik dipersiapkan dalam upaya penyiapan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat serta dunia usaha/dunia industri dalam dunia nyata dan dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut menjadi faktor yang membantu sekolah mewujudkan terjalannya kemitraan sekolah, sekaligus menjadi faktor yang membantu sekolah dalam membangun kepercayaan mitra sekolah.

Beberapa hal tersebut di atas juga sesuai dengan jurnal administrasi pendidikan pascasarjana Syiah Kuala oleh Azizah, Murniati AR, dan Khairuddin dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Kerjasama Sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Pada SMK Negeri 1 Banda Aceh. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa dalam menjalin hubungan kerjasama antara SMK Negeri 3 dengan DU/DI, tentu ada faktor faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut ada yang berasal dari dalam organisasi (faktor internal) dan luar organisasi (faktor eksternal). Adapun faktor yang internal dan eksternal tersebut adalah: tenaga pendidik SMK, Kompetensi pendidik SMK, sarana dan prasarana SMK, kemampuan IPTEK, dan kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan Yunida Cahya Kinanti, 2016 juga mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam kemitraan sekolah adalah fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Fasilitas tersebut dapat berupa motivasi, sarana dan prasana. Fasilitas yang diberikan sekolah tentunya memiliki tujuan tertentu di dalamnya. Fasilitas tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam kelancaran kemitraan sekolah.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Kurikulum yang berubah-ubah mengakibatkan terjadinya perubahan regulasi. Perubahan itu berpengaruh pada perubahan komposisi jam mata pelajaran. Perubahan komposisi jam mata pelajaran untuk setiap guru mata pelajaran menjadi 40 jam seminggu sesuai dengan permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru pasal 2 yang menyebutkan beban kerja selama 40 jam dalam satu minggu dengan rincian 37,5 jam kerja efektif, dan 2,5 jam istirahat. Hal ini mempengaruhi kebutuhan tenaga pendidik di SMK negeri 1 Luwu Timur yang pada awalnya kebutuhan tenaga pendidik telah terpenuhi, dengan adanya perubahan komposisi jam pelajaran ini mengakibatkan sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik. Olehnya itu, sekolah akhirnya mencari tenaga pendidik honorer untuk memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan komposisi jam pembelajaran yang dipersyaratkan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memenuhi kuantitas peserta didik. ketersediaan sarana dan prasana merupakan salah satu faktor penunjang pelaksanaan penerapan aspek kemandirian sekolah. Kemandirian sekolah salah satunya di tunnjukkan melalui kemampuan sekolah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhannya dalam hal sarana dan prasarana. Sebab kebutuhan akan sarana dan prasarana sekolah akan mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah. olehnya itu pihak sekolah perlu melakukan upaya kreatif dalam memenuhi kebutuhannya akan sarana dan prasarana, utamanya dalam hal sarana mpembelajaran

praktek di sekolah. Sesuai dengan lampiran VI Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang standar sarana dan prasarana mengungkapkan bahwa dalam rangka mewujudkan amanat tujuan pendidikan kejuruan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi kriteria minimum yang meliputi: sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lainnya.

- c. Ketersediaan akses informasi dalam rangka penerapan aspek transparansi dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Ketersediaan sistem informasi disekolah merupakan upaya dalam memberikan informasi secara terbuka terhadap pengelolaan pendidikan dan pengelolaan kurikulum di sekolah sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah. hal ini dapat mendorong pengembangan pendidikan partisipatif yang bermanfaat dalam pengembangan pendidikan di sekolah. Lampiran VII Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang standar pengelolaan menyebutkan bahwa SMK melaksanakan pengelolaan berdasarkan skala prioritas sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu dan memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk ikut meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sekolah telah menyediakan akses informasi berupa website sekolah akan tetapai dalam pengelolaannya masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga pelaksanaan akses informasi lebih banyak dilaksanakan dalam pengelolaan manual melalui

papan informasi sekolah sehingga akan menyulitkan publik untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian lampiran VII Permendikbud No.34 Tahun 2018 tentang standar pengelolaan juga menyebutkan bahwa SMK mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan dan pembelajaran yang efektif, efisien, dan akuntabel menuju manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi; menyediakan fasilitas informasi yang efektif, efisien, dan mudah diakses untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran; membentuk tim yang bertanggungjawab tentang pengelolaan informasi manajemen.

- d. Faktor ketersediaan dunia usaha/dunia industri yang sesuai dengan kriteria kemitraan sekolah. Ketersediaan dunia usaha/dunia industri menjadi salah satu faktor penghambat kemitraan sekolah. salah satu kriteria SMK Negeri 1 Luwu Timur adalah bahwa dunia usaha/dunia industri merupakan institusi yang besar dan berpengalaman serta dengan fasilitas peralatan yang lengkap. Mengingat Luwu Timur merupakan kabupaten termuda di wilayah Luwu Raya dan merupakan kabupaten yang baru berkembang. Ketersediaan dunia usaha/dunia industri yang masuk dalam kriteria mitra sekolah masih sangat kurang sehingga tidak mampu menampung kuantitas peserta didik utamanya dalam pelaksanaan program kemitraan yakni prakerin. Pelaksanaan prakerin memiliki tujuan selain mengembangkan pengalaman siswa dalam dunia industri, juga mengembangkan pengetahuan siswa dalam meningkatkan kompetensi terkait penggunaan peralatan terbaru yang tidak didapatkannya dalam pelatihan disekolah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan aspek- aspek manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan kurikulum di SMK Negeri 1 Luwu Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan aspek otonomi manajemen berbasis sekolah pada pengelolaan kurikulum di sekolah telah dijalankan dengan baik. Hal ini ditandai dengan pengambilan keputusan secara mandiri dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan program pembelajaran di sekolah baik itu dalam hal penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
2. Penerapan aspek kemandirian di sekolah ditandai dengan kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan sumberdayanya dengan menambah tenaga pendidik sesuai dengan komposisi jumlah jam mata pelajaran yang di persyaratkan. Serta upaya yang dilakukan sekolah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarannya baik itu melalui program kerjasama dan juga melalui permohonan pengadaan sekolah.
3. Penerapan aspek partisipasi manajemen berbasis sekolah juga telah dijalankan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya komite sekolah, serta melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan pendidikan di sekolah. Hal ini di tandai dengan peran aktif komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dan masukan kepada sekolah baik itu dalam pertemuan dan atau dalam pelaksanaan koordinasi. Peran aktif komite sekolah juga di tunjukkan dalam memberikan bantuan untuk membiayai finansial tenaga honorer di sekolah.
4. Penerapan aspek kemitraan sekolah juga telah dilaksanakan,. Akan tetapi, penerapan aspek kemitraan ini masih belum terlaksana secara maksimal karena pelaksanaan kemitraan di sekolah lebih ditekankan pada pelaksanaan prakerin saja sementara masih banyak

faktor-faktor lain dalam proses kerjasama ini yang dapat memberikan manfaat yang lebih dalam pengembangan pendidikan di sekolah seperti misalnya program guru tamu.

5. Penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kurikulum di sekolah juga berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan adanya sikap keterbukaan sekolah kepada publik ditunjukkan melalui pengadaan akses-akses informasi untuk memfasilitasi kebutuhan informasi publik terhadap pengelolaan pendidikan dan untuk memfasilitasi pertanyaan, usulan, pertimbangan dan masukan dari masyarakat, pelaksanaan koordinasi dan atau komunikasi-komunikasi, serta pelaksanaan pertanggung jawaban program baik yang bersifat administrasi dan juga rapat pertanggungjawaban kegiatan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka disarankan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah:
  - a. Diharapkan dapat memberikan pengarahan dan atau melaksanakan koordinasi yang dianggap perlu kepada sekolah dalam mengimplementasikan pengelolaan pendidikan dengan model manajemen berbasis sekolah.
  - b. Memperhatikan dan memberikan bantuan terkait pengembangan pendidikan dan juga pengembangan pembelajaran di SMK Negeri 1 Luwu Timur.
  - c. Meningkatkan kompetensi pendidik dengan lebih meningkatkan pelatihan- pelatihan yang berkaitan dengan penerapan aspek-aspek manajemen berbasis sekolah.
2. Bagi pihak sekolah:
  - a. Pengembangan kemitraan di sekolah masih perlu ditingkatkan, dengan membentuk tim kehumasan yang mengurus terkait pelaksanaan kemitraan sekolah sehingga pelaksanaan kemitraan dapat dikembangkan serta berjalan secara

sistematis dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

- b. Dalam aspek akuntabilitas sekolah, perlu diadakan papan informasi pengelolaan anggaran sekolah dan juga anggaran kegiatan untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
- c. Perlunya usaha kreatif dan inovatif dari setiap elemen kepentingan di sekolah dalam memenuhi sumberdayanya guna memenuhi kebutuhan, baik dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan akan tenaga pendidik dan kependidikannya serta pengelolaan dan pemenuhan kebutuhannya akan sarana dan prasarana sekolah. Seperti pembuatan usaha bersama sesuai dengan bidang keahlian yang ada sekolah. contohnya membuat bengkel sekolah, pembuat produk-produk yang dapat dijual. Hal ini selain dapat meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik dalam memperdalam kompetensinya serta menjadi modal tersendiri bagi lulusan nantinya yang tidak terserap kedalam dunia kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2012). *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Peningkatan Mutu Belajar Siswa DI SMP Al-Firdaus Kartasura Sukoharjo* [S2, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. [http://eprints.ums.ac.id/20842/10/BA\\_B\\_5.pdf](http://eprints.ums.ac.id/20842/10/BA_B_5.pdf)
- Ali, Mohammad. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT. IMTIMA.
- Amanah, S. (2014). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Sdn 2 Sidokumpul Gresik. Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 3(3). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/6635>
- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Andi, Sujatmiko. (2012). Peran Serta Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SDN 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta, Skripsi. UNY.
- Asmani, J. M. (2012). *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf. (2010). *Benchmark International, Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dedy Mulyasana. (2011). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)*. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Fattah, Nanang, 2004, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah (Komite Sekolah)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Hamzah, H. (2013). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(1), 151–175. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i1.23>.
- Hermiono, Agustinus. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah (Kajian Teoritis dan Praktis dalam Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0490/1992 tentang Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Kompri. (2014). *Manajemen Sekolah (Teori dan Praktek)*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Rosda.
- Murniati AR dan Usman, Nasir. (2009). *Implementasi Manajemen Strategik: dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Mutohar, Prim Masrokan. (2013). *Manajemen Mutu Sekolah (Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan)*. Jogjakarta: Ar- RuzzMedia.
- Nana Syaodih, dkk. (2006). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nur Anisah. (2011). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Deskriptif pada TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal)* [Other, Universitas Negeri Semarang]. <https://lib.unnes.ac.id/6360/>
- Nurkholis. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Grasindo.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pidarta, Made. (1988). *Perencanaan pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta P2LPTK.
- Rohiat. (2012). *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Rodliyah, ST. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Saade, K. (2011). *Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Implementasinya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 16–29. <https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.870>
- Sabil, H. (2014). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) di SMPN 11 Kota Jambi*. *Sainmatika: Jurnal Sains*

- dan Matematika Universitas Jambi, 8(1), 221069.
- Saiful Sagala. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: PT Nimas Multima.
- Slamet, P. (2001). *Manajemen Berbasis Sekolah*.  
<http://www.pdk.go.id/jurnal/27/manajemen-berbasis-sekolah.htm>
- Suparlan. (2015). *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Prakteik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tatang S. (2015). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia
- Tilaar, H. A. R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triyanto, T. ( 2015). *Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah*. (t.t.). Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah | Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah | MBS RC Portal. Diambil 15 Februari 2020, dari [https://mbscenter.or.id/site/page/id/372/page\\_action/viewdetail](https://mbscenter.or.id/site/page/id/372/page_action/viewdetail)
- Umaedi, dkk. (2008). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wibowo, E. (2013). *Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan*. 11.
- Zamroni. (2013). *Manajemen Pendidikan: Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah*